

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, O. (2014). Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 492–498.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dear Rani, J., & H. Mutiha, A. (2021). Penerapan Psak 72 Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Pada Pt Kis. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(P-ISSN 2622-1764 E-ISSN 2622-1152), 38–46.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020.
- Fatkul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah. *Fiat Justisia Jurnal*, 8(1), 69–79.
- Handaka, R. D. (2017). Analisis Peranan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Bumi Sebagai Pendanaan Desentralisasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 27–38. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.140>.
- Hardati, P. (2013). Forum ilmu sosial. *Forum Ilmu Sosial*, 40(2), 178–188. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS_JURNAL.
- Herdiyana, D. (2021). Analisis Pengakuan dan Penyajian Lebih Bayar dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Laporan Keuangan BUN BA-999.05. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(2), 121.

<https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i2.2064>.

Hidayat, S. (2008). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif state-society relation. *Poelitik*, 1(1), 1–28.

Kadim, A. (2016). *Panduan Sistem Akuntansi pada Sektor Perminyakan di Indonesia*.

Kementerian Dalam Negeri. (2006). Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2013). Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kementerian ESDM. (2016). Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian ESDM. (2017). Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Kementerian Keuangan. (2012). PMK No. 165 Tahun 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

Kementerian Keuangan. (2020). KMK No. 22 Tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada tahun 2020.

Kementrian Keuangan. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2020). PMK No. 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kementerian Keuangan. (2020). PMK No. 20 Tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020.

Kementerian Keuangan. (2020). PMK No. 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Kementerian Keuangan. (2020). PMK No. 180 Tahun 2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019.

Kementerian Keuangan. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. In Kementerian Keuangan (Vol. 2020).

Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Gema Eksos*, 129–144.
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=142378&val=5460&title=OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=142378&val=5460&title=OTONOMI%20DAERAH%20DAN%20DESENTRALISASI%20FISKAL%20DI%20INDONESIA).

PDTIESDM. (2016). *Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas (Studi Kasus Provinsi Jambi)*.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Bumi dan Gas Bumi.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2005). PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saleh, A.K., Idrus, M. S. I., Salim, U., & Setiawan, M. (2020). Lifting, Harga Minyak, Cost Recovery dan Pengaruhnya terhadap Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Penghasil (Studi pada Industri Migas di Provinsi Riau). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9(4), 1476-1484.

Saputra, K. A. (2020). Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.

Sarifudin, R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) Pada Sektor Migas. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 128–139.

Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.

- Suyono, B. R. (2019). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Riau. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*.
- Syafrudin, A. (1983). Pasang Surut Otonomi Daerah. *Orasi Dies , Seperempat Abad Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, 42.
- Wibowo, P. (2016). Menuju Kebijakan Akuntansi yang Paripurna: Studi Kasus Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Hulu Migas.
- Wibowo, P. (2017). MENAKAR IMPLIKASI GOVERNMENT SPENDING. 1, 61– 85.